

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang berada di bagian pesisir utara Pulau Jawa dan merupakan kota yang besar karena dikenal sebagai pusat perdagangan, pariwisata maupun industri. Kota Semarang sendiri memiliki karakteristik wilayah yang beragam mulai dari kawasan dataran rendah yang terletak di bagian utara hingga kawasan perbukitan yang terletak di bagian selatan yang kemudian sering dikenal sebagai Semarang atas dan Semarang bawah. Kondisi Geografis dan demografis tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi lokasi strategis dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah termasuk penelitian yang kaitannya dengan isu sosial maupun administrasi publik. Perbedaan kondisi geografis ini turut memengaruhi pola permukiman, aktivitas ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat. Keberagaman kondisi geografis dan demografis tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai lokasi yang strategis dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk sebagai objek penelitian yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan administrasi publik, karena mampu merepresentasikan kompleksitas permasalahan perkotaan secara komprehensif.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah berada di antara garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Sebagai salah satu kota di garis pantai utara Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki elevasi antara 0,75 sampai 348,00 meter di atas permukaan laut. Transportasi darat

serta transportasi udara yang semuanya berpotensi sebagai icon transportasi Regional Jawa Tengah. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu gerbang perdagangan laut semakin memperkuat peran Semarang sebagai pusat distribusi, perdagangan, serta pelayanan publik yang penting, sekaligus mendukung pertumbuhan pembangunan kota yang pesat.

Gambar 2. 1 Peta Kondisi Geografis Kota Semarang



Sumber : ppid.semarangkota

Kota Semarang secara umum dikenal sebagai kota pesisir, yang tidak terlepas dari kondisi topografi wilayahnya yang cukup beragam, dengan ketinggian lahan berkisar antara sekitar 0,75 meter hingga kurang lebih 348 meter di atas permukaan laut. Variasi ketinggian tersebut membentuk bentang alam yang khas, di mana wilayah Kota Semarang terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, serta wilayah dataran tinggi dan perbukitan. Kawasan pesisir dan dataran rendah lebih banyak mendominasi wilayah bagian utara Kota Semarang, khususnya di

Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 0,75 hingga 90,56 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Semarang bagian utara yang kerap dikenal sebagai Semarang bawah memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai pusat utama berbagai kegiatan pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Kawasan ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang vital, seperti stasiun kereta api, bandar udara, serta pelabuhan, yang berperan penting dalam menunjang mobilitas penduduk dan arus barang. Keberadaan berbagai infrastruktur strategis tersebut menjadikan wilayah Semarang bawah sebagai pusat atau simpul utama dalam aktivitas ekonomi, perdagangan, serta interaksi sosial masyarakat. Kondisi ini mendorong tingginya mobilitas penduduk dan distribusi barang, yang pada akhirnya berpengaruh signifikan terhadap percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, peran Semarang bawah sebagai pusat aktivitas tersebut turut membentuk dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Kota Semarang secara menyeluruh.

Sementara itu, wilayah dataran tinggi dan perbukitan yang terletak di bagian selatan Kota Semarang dikenal sebagai Semarang atas. Secara geografis, wilayah ini ditandai dengan kondisi lahan yang semakin meningkat ketinggiannya ke arah selatan, dengan kisaran antara 90,56 hingga 348 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini meliputi wilayah pinggiran kota serta beberapa kecamatan di bagian selatan Kota Semarang, seperti Kecamatan Mijen, Banyumanik, dan Tembalang. Perbedaan karakteristik wilayah antara Semarang bawah dan Semarang atas tersebut mencerminkan kompleksitas kondisi geografis Kota Semarang yang turut

memengaruhi pola pembangunan, persebaran penduduk, serta dinamika sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang dan Jumlah Kelurahan pada Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunung Pati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisasi	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,2
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Tmur	10	7,77
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,7

Sumber : RKPD Kota Semarang 2025

2.1.2 Kondisi Demografis

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar marang memiliki luas wilayah dengan total 73,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan secara geografis, batas Kota Semarang adalah Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Demak di bagian timur, Kabupaten Semarang di bagian selatan, dan Laut Jawa di bagian utara.. Letak geografis tersebut menjadikan Kota Semarang memiliki posisi yang strategis, baik sebagai kota pesisir maupun sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik di tingkat provinsi. Kondisi batas wilayah ini juga memengaruhi dinamika pembangunan, mobilitas penduduk, serta hubungan sosial dan ekonomi antara Kota Semarang dengan daerah sekitarnya.

A. Kepadatan Penduduk

Tabel 2. 2 Indikator Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022 – 2024

Penduduk	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.659.975	1.694.779	1.717.833
Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km ²)	4.441,05	4.534,07	4.595,00
Sex Ratio (L/P)	97,93	97,91	97,86

Sumber : BPS, Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk yang ada di Kota Semarang mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu dari tahun 2022 ke tahun 2024 dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tingkat kepadatan penduduk juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kota Semarang terkait berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, pendidikan,

politik dan berbagai aspek penting lainnya. Mengingat tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, hal ini juga harus diimbangi dengan kontrol sosial yang kuat dengan tujuan untuk memastikan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan setiap lapisan masyarakat

Semakin tinggi tingkat kepadatan suatu wilayah maka semakin kompleks juga dinamika kehidupan masyarakat baik dari kebutuhan pelayanan publik, interaksi sosial hingga berbagai potensi timbulnya masalah sosial seperti kesenjangan sosial. Kepadatan penduduk yang sedemikian rupa juga tidak lepas dari kontrol sosial yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan sosial yang adil dan ramah terhadap kelompok rentan. Tingginya tingkat kepadatan penduduk pada suatu wilayah berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kompleksitas dinamika kehidupan masyarakat yang berlangsung di dalamnya. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi besarnya kebutuhan terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi, tetapi juga berdampak pada intensitas interaksi sosial antarindividu dan kelompok masyarakat.

Dalam situasi tertentu, kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan dan pelayanan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang beragam, misalnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, serta meningkatnya kerentanan kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepadatan penduduk yang tinggi perlu diiringi dengan adanya penguatan kontrol sosial yang efektif sebagai bagian dari upaya pengelolaan kehidupan sosial. Kontrol sosial berperan dalam menjaga keteraturan, mencegah konflik, serta memastikan bahwa norma dan nilai sosial tetap berjalan secara harmonis. Selain itu, keberadaan kontrol sosial yang baik menjadi elemen penting dalam

mewujudkan pembangunan sosial yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

B. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses – proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi Said, (2001) dalam (Putri N, 2021). Penduduk dapat disimpulkan sebagai keseluruhan individu yang menetap dan tinggal pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu, yang keberadaannya tidak bersifat statis melainkan terus mengalami perubahan. Jumlah, struktur, serta karakteristik penduduk tersebut terbentuk sebagai hasil dari berbagai proses demografi yang saling berkaitan, yaitu tingkat kelahiran atau fertilitas, tingkat kematian atau mortalitas, serta perpindahan penduduk atau migrasi. Ketiga faktor demografi tersebut secara bersama-sama memengaruhi dinamika pertumbuhan dan persebaran penduduk di suatu wilayah. Pemahaman mengenai penduduk tidak hanya terbatas pada jumlah semata, namun mencakup proses dan faktor yang membentuk perubahan penduduk, yang selanjutnya memiliki implikasi penting terhadap perencanaan pembangunan, penyediaan pelayanan publik, serta kebijakan sosial di suatu daerah.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Mijen	46.420	46.668	93.088

Gunung Pati	50.735	50.842	101.577
Banyumanik	70.861	72.885	143.746
Gajah Mungkur	27.600	28.734	56.334
Semarang Selatan	30.224	31.794	62.018
Candisari	37.317	38.125	75.442
Tembalang	100.313	101.508	201.821
Pedurungan	97.609	99.859	197.468
Genuk	68.709	68.647	137.356
Gayamsari	35.019	35.369	70.388
Semarang Timur	32.280	34.195	66.475
Semarang Utara	58.229	59.636	117.865
Semarang Tengah	26.454	28.754	55.208
Semarang Barat	73.355	75.972	149.327
Tugu	17.054	17.038	34.092
Ngaliyan	72.998	73.630	146.628
Total	854.177	863.656	1.708.833

Sumber : BPS Kota Semarang, 2024

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 1.708,83 ribu jiwa, dengan komposisi penduduk perempuan mendominasi dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi ini mencerminkan dinamika demografis yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan wilayah perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk tersebut membawa berbagai implikasi terhadap kebutuhan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, dinamika demografi yang terjadi perlu diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang tepat, serta penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap karakteristik penduduk. Kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan aspek demografis diharapkan

mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Kota Semarang secara optimal dan berkelanjutan.

2.1.3 Kondisi Ekonomi Sosial

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah merupakan kota dengan pusat pemerintahan, jasa, perdagangan serta perindustrian dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dari tahun ke tahun dengan kontribusi yang berasal dari sektor perdagangan, restoran, industri serta transportasi. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi di tingkat regional. Kota ini berkembang sebagai sentra jasa, perdagangan, dan perindustrian yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur serta posisi geografis yang strategis. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan pergerakan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan dinamika perekonomian perkotaan yang cukup kuat dan berkelanjutan.

Kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang berasal dari berbagai sektor unggulan, seperti sektor perdagangan dan jasa, termasuk restoran, sektor industri, serta sektor transportasi yang menunjang mobilitas barang dan penduduk. Perkembangan sektor-sektor tersebut tidak hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi perkotaan. Perkembangan sektor-sektor ekonomi yang dominan tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian, tetapi juga berimplikasi terhadap dinamika sosial masyarakat, seperti pola kerja, tingkat kesejahteraan, serta kebutuhan akan pelayanan publik. Keterpaduan antara aspek ekonomi dan sosial

tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai wilayah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan regional secara berkelanjutan.

Tabel 2. 4 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2021-2024

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)			
2021	2022	2023	2024
123	135	147	157

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025

Berdasarkan PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2021-2024 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PDRB per kapita yang konsisten dari tahun ke tahun hingga mencapai RP 157 juta pada 2024, kenaikan ini juga menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Semarang sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024 perekonomian Kota Semarang menunjukkan nilai positif dengan pertumbuhan sebesar 5,62 persen (BPS, 2025) dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tercatat mencapai Rp 267.551,35 miliar, sedangkan PDRB atas harga konstan mencapai Rp 170,947,72 miliar. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh kontribusi besar dari sektor industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian daerah.

Tabel 2. 5 Kontribusi Lapangan Usaha Kota Semarang Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Total
1	Industri	28,35 %
2	Konstruksi	26,87 %
3	Perdagangan	12,95 %

Sumber : BPS Kota Semarang, 2024

2.1.4 Keadaan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

BPS Kota Semarang mencatat penyandang disabilitas kategori fisik dengan jenis disabilitas lumpuh layu yakni sebanyak (833 jiwa), lalu kategori masalah kaki sebanyak (797 jiwa) dan masalah tangan (302 jiwa). Sedangkan jenis disabilitas sensorik dengan tuna wicara sebanyak (767 jiwa), buta total (378 jiwa) dan *low vision* sebanyak (177 jiwa). Berdasarkan Angka ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik menduduki jumlah yang tertinggi dalam kelompok masyarakat yang tergolong rentan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Tabel 2. 6 Ragam Disabilitas Menurut Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan /Kelurahan	Masalah Kaki	Masalah Tangan	Lumpuh Layu	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Grahita	Low Vision	Buta Total	Autis	Down Syndrome	Lambat Belajar	Penyakit Kronis	Total
1	Semarang Tengah	56	23	19	25	24	17	7	16	16	22	10	8	243
2	Semarang Utara	50	13	52	37	50	20	14	20	19	25	30	46	376
3	Semarang Timur	40	14	65	47	45	29	15	28	16	21	38	51	409
4	Gayamsari	43	12	43	31	46	19	10	24	24	15	39	38	344
5	Genuk	56	17	83	56	56	53	13	19	30	24	44	68	519
6	Pedurungan	51	18	73	59	56	25	14	33	34	32	38	41	474
7	Semarang Selatan	36	25	27	30	36	21	7	16	7	22	19	29	275
8	Candisari	58	32	51	67	55	40	22	24	21	31	29	28	458
9	Gajahmungkur	18	7	30	25	28	32	8	15	5	23	26	3	220
10	Tembalang	53	22	78	86	98	83	17	31	35	63	55	29	650
11	Banyumanik	49	15	53	42	55	41	11	27	26	28	43	43	433
12	Gunungpati	49	16	62	38	56	25	7	27	22	28	38	22	390
13	Semarang Barat	96	39	40	49	76	22	7	34	39	53	44	52	551
14	Mijen	73	24	73	41	38	18	8	24	19	27	14	28	387
15	Ngaliyan	50	23	84	45	37	48	13	28	38	39	31	46	462
16	Tugu	19	2	20	11	11	9	4	12	16	2	14	29	149
	Jumlah	797	302	833	689	767	502	177	378	367	455	512	561	6.340

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2021

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Semarang, jumlah penyandang disabilitas di wilayah tersebut menunjukkan menunjukkan pergerakan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Jika ditinjau secara lebih rinci sejak tahun 2021, penyandang disabilitas dengan

kategori disabilitas fisik tercatat sebagai kelompok dengan jumlah paling dominan dibandingkan dengan jenis disabilitas lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan disabilitas fisik menjadi salah satu isu sosial yang cukup signifikan di Kota Semarang. Peningkatan jumlah penyandang disabilitas fisik tersebut menuntut adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan kebijakan, penyediaan layanan rehabilitasi sosial, serta penguatan program perlindungan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.

2.2 Dinas Sosial Kota Semarang

2.2.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintahan di tingkat daerah yang bertanggungjawab utama dalam menyelenggarakan urusan terkait bidang sosial. Kewenangan dan tugas lembaga ini telah diatur secara resmi dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2006, yang mengatur mengenai pembentukan, struktur organisasi, serta mekanisme kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial memiliki peran sentral untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan daerah. Lembaga ini beroperasi dengan berlandaskan visi dan misi tertentu yang menjadi pedoman dalam merumuskan program, kegiatan, serta kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Visi : “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan

Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Misi : “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Menghasilkan Laporan Kinerja yang Berkualitas”

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang sosial, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Fokus utama lembaga ini mencakup pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan masalah fakir miskin. Setiap bidang yang ada di Dinas Sosial bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas dan program yang bertujuan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk fakir miskin, anak-anak terlantar, lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Selain melaksanakan program-program tersebut, Dinas Sosial juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial yang berada di wilayah kerja Kota Semarang. Lembaga ini mengelola data dan sistem informasi kesejahteraan sosial secara terintegrasi, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, serta menyusun perencanaan program. Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan terkait penyelenggaraan urusan sosial, yang seluruhnya didukung oleh dokumentasi administrasi yang rapi dan sistematis, sehingga proses pengelolaan sosial dapat berjalan efektif dan akuntabel.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam suatu instansi yang keberadaannya

sangat penting untuk menjamin tercapainya koordinasi serta pelaksanaan program yang baik. Dinas Sosial Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber : dinsos.semarangkota.go.id

Sesuai dengan struktur organisasi pada Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016, Dinas Sosial Kota Semarang terdiri atas 4 bidang yaitu :

- Bidang Pemberdayaan Sosial, bidang ini terbagi menjadi 3 seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- Bidang Rehabilitasi Sosial, terbagi menjadi 3 seksi yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terbagi menjadi 3 seksi yakni Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terbagi menjadi 3 Seksi yaitu Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan